



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : POLITEKNIK NEGERI MALANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FERONIKA WIJAYANTI
2. Jabatan : KEPALA URUSAN PERBENDAHARAAN
3. NHK : 254979

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **5.150.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/150 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , Rp. 1.100.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 164 m2/225 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , Rp. 1.100.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 95 m2/70 m2 di KAB / KOTA TULUNGAGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **527.000.000**

1. MOTOR, HONDA HONDA F1CO2N28LO AT / SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOBIL, FORTUNER TOYOTA/FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 AT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 340.000.000
3. MOBIL, HONDA BRIO BRIO SATYA Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **275.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **12.600.000**



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 5.964.600.000

III. HUTANG

Rp. 465.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 5.499.600.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.